

KOPI DI PRIANGAN ABAD XVIII-XIX

PRIANGANS COFFEE IN XVIII-XIX CENTURY

Lasmiyati

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung,
Jln. Cinambo No.136 Ujungberung - Bandung
lasmiyatinizam@gmail.com

Naskah Diterima: 25 Februari 2015

Naskah Direvisi: 27 Maret 2015

Naskah Disetujui: 29 April 2015

Abstrak

Sejak 20 Juli 1818 Keresidenan Priangan terdiri atas Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Daerah tersebut sebagai penghasil kopi. Kopi pada saat itu merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa, sehingga memicu VOC untuk memasok kopi dari pegunungan Priangan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa biji kopi yang ditanam di Priangan dapat tumbuh subur, bahkan sewaktu Cianjur dijabat oleh Wiratanu III dapat menyerahkan hasil tanaman kopi melebihi kabupaten lainnya. Selama kopi dalam pengawasan VOC, harga di pasaran terus naik, namun di tingkat petani harga kopi sangat rendah, akibatnya para petani banyak yang meninggalkan perkebunan. Ketika kekuasaan VOC digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda, Daendels merangkul para bupati untuk bekerja sama dalam hal penanaman kopi. Bupati dan bawahannya mendapatkan persentasi dari penanaman kopi tersebut, namun sayang penduduknya dipekerjakan untuk membangun infrastruktur tanpa imbalan, rakyat pun banyak yang mati kelaparan. Masa pemerintahan Van der Cappelen, penanaman kopi di Priangan mengalami penurunan seiring dengan wabah penyakit yang melanda Keresidenan Priangan. Pada masa kepemimpinan Van den Bosch, penanaman kopi dipadukan dengan tanaman lainnya, seperti kapas, sutera, dan lain-lain. Meskipun kopi di pasaran dunia terus naik, namun penanaman kopi tidak membuahkan hasil yang maksimal.

Kata kunci: Priangan, kopi abad 18-19.

Abstract

In the 20th century, Priangan territory; Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan (Garut), Sukapura (Tasiklamalaya), and Ciamis was known as the region producer of coffee. Coffee at that time was a commodity that needed by the Europeans, thus triggering the VOC to come to Priangan mountains. This study uses a heuristic method to the stage of history, criticism, interpretation, and historiography. It was obtained an information from the result of this research that the coffee beans which is grown in Priangan can flourish easily. When Cianjur was held by Wiratanu III, Cianjur be able to deliver the coffee plant exceedeed other districts. During the coffee was in VOC controled, market prices continued to rise, but at the farm level the price was very low, as the result many farmers left plantations. When the power of VOC was replaced by the Dutch, Daendels approached the regents to work together on coffee growing. The Regent and his subordinates would get benefit of the coffee growing, but unfortunately the population was employed to build infrastructure without reward hence too many people were dying of hunger. In the reign of Van der Cappelen, the coffee cultivation in Priangan decreased since the disease outbreaks that hit Priangan Residen. During the reign of Van den Bosch, the coffee plantation was combined with other crops, such as cotton, silk, and others. Although coffee in the world market continued to rise, but the cultivation of coffee does not produce maximum results.

Keywords: Priangan, Coffe, Planting Forced.

A. PENDAHULUAN

Pada abad ke-18 kopi sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa di Eropa, permintaan kopi melonjak dengan harga yang terus naik membuat komoditas kopi menjanjikan. VOC (*Veerenigde Oost Indische Compagnie*) sebuah kantor dagang milik Belanda memanfaatkan peluang tersebut. VOC berkeinginan menjadi pemasok utama di pasaran Eropa. Peluang dagang yang laku di pasaran Eropa di antaranya teh, tebu, dan kopi, kesemuanya tumbuh subur di pegunungan Priangan¹.

Priangan menurut Ekadjati adalah wilayah di bagian selatan Jawa Barat yang terbentang antara Cianjur di sebelah barat sampai dengan Ciamis di sebelah timur. Pada abad ke-18 kopi berhasil ditanam di wilayah Priangan. Permintaan kopi yang terus meningkat, membuat penanaman kopi di Priangan juga meningkat. Artikel ini akan membahas mengenai “Kopi di Priangan Abad ke-18 – 19. Permasalahannya adalah sejak kapan dan apa dampaknya sejak diberlakukannya Tanam Paksa di Priangan serta bagaimana kehidupan masyarakat Priangan pada abad ke-18 - 19.

Ada beberapa artikel atau tulisan terdahulu baik berupa laporan penelitian atau pun buku. Tulisan terdahulu tersebut adalah Laporan Penelitian yang ditulis oleh Reiza Dienaputera “Perubahan Sosial Politik di Cianjur (1816-1942). Dari laporan penelitian dikupas bahwa dengan

dijadikannya Cianjur sebagai pusat kekuasaan Kolonial, otomatis Cianjur pun menjadi ibukota Keresidenan Priangan. Dengan demikian kedudukan Cianjur lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Residen Priangan yang mengawasi pelaksanaan *Preangerstelsel* khususnya penanaman kopi bertempat tinggal di Bandung. Sejak tahun 1864 ibu kota Keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung. Dengan berpindahnya ibu kota keresidenan dari Cianjur ke Bandung maka ‘arti penting’ Cianjur menurun di mata pemerintah Kolonial. Tulisan Reiza Dienaputra lainnya mengenai Cianjur berjudul *Cianjur* dalam buku “Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat”. Buku tersebut mengulas mengenai penduduk Cianjur mengalami kemajuan. Hal itu didorong dengan keberhasilannya Cianjur sebagai penghasil kopi.

Dari beberapa artikel yang terdahulu, ada sisi yang kosong yaitu dampak dari adanya penanaman kopi di Priangan. yang dalam artikel ini perlu dilakukan penulisan. Tujuan artikel ini untuk menjawab pertanyaan yaitu sejak kapan penanaman kopi diberlakukan di Priangan; dampak adanya Tanam Paksa; dan bagaimana kehidupan masyarakat Priangan abad ke-18 – 19.

Tulisan ini dibatasi pada ruang dan waktu. Ruang penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Priangan, alasannya adalah pada abad ke-17 bupati Cianjur Wiratanu III berhasil meningkatkan pendapatan dari penanaman kopi. Atas keberhasilannya, Wiratanu III mendapat hadiah dari VOC berupa wilayah di sekitarnya untuk bergabung dengan wilayah Wiratanu. Masa kekuasaan Wiratanu III, Cianjur mengalami perluasan wilayah. Pada abad ke-19 pemerintah Kolonial menerapkan wajib tanam kopi di Priangan khususnya di Cianjur. Pendapatan pemerintah Kolonial pun semakin bertambah namun kehidupan rakyat semakin hari semakin menderita.

¹ Kata Priangan muncul pada masa Kesultanan Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung. Sultan Agung pernah mengklaim bahwa seluruh wilayah Jawa Barat kecuali Banten dan Cirebon berada di bawah kekuasaannya. Klaim Sultan Agung tersebut membuat Raden Suriadiwangsa ketakutan. Atas kemauannya sendiri Raden Suriadiwangsa datang ke Mataram menyatakan pengakuannya bahwa Sumedang berada di bawah kekuasaan Mataram. Karena ketulusan hati Raden Suriadiwangsa mengakui kekuasaan Mataram, maka wilayah yang dikuasai Raden Suriadiwangsa dinamakan *Prayangan* yang artinya tulus ikhlas. Nama *Prayangan* kemudian berubah menjadi Priangan (Muhsin, 2008: 11).

Dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan sejarah dan ekonomi. Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa sejarah ekonomi mencakup dalam pelbagai aspeknya yang semakin menonjol, lebih-lebih setelah proses modernisasi. Di mana-mana semakin memfokuskan perhatian pada pembangunan ekonomi, dari sistem produksi agraris ke sistem produksi industrial. Dengan terbentuknya jaringan navigasi atau transportasi perdagangan di satu pihak dan di pihak lain jaringan antara daerah industri dan daerah bahan-bahan mentah, muncullah satu sistem global ekonomi. Sistem ini mempunyai implikasi luas dan mendalam tidak hanya di bidang ekonomi tetapi erat hubungannya dengan bidang politik. Dari pertumbuhan sistem ekonomi global yang kompleks dapat diekstrapolasikan beberapa tema penting seperti: 1) proses perkembangan ekonomi dari sistem agraris ke sistem industrial, termasuk organisasi pertanian, pola perdagangan, lembaga-lembaga, keuangan, kebijakan komersial, dan pemikiran (ide) ekonomi; 2) pertumbuhan akumulasi modal mencakup peranan pertanian, pertumbuhan penduduk, peranan perdagangan internasional; 3) proses industrialisasi beserta soal-soal perubahan sosialnya; 4) sejarah ekonomi yang bertalian erat dengan permasalahan ekonomi, seperti kenaikan harga, konjungktur produksi agraria, ekspansi perdagangan, dan sebagainya; dan 5) sejarah ekonomi kuantitatif yang mencakup antara lain Gross National Product (GNP) per *capita income* (Kartodirdjo, 1992: 136-137). Tulisan ini akan mengambil pendekatan dalam satu aspek sejarah ekonomi yang bertalian erat dengan permasalahan ekonomi, seperti kenaikan harga, konjungktur produksi agraria, ekspansi perdagangan, dan sebagainya. Dari pendekatan tersebut dapat dianalogikan bahwa pembangunan ekonomi, dari sistem produksi agraris ke sistem produksi industrial, kekuatan ekonomi akan menjadi pemusatan pasar

seandainya didukung oleh jaringan navigasi dan transportasi.

Kuntowijoyo berpendapat bahwa Sejarah Ekonomi mempelajari manusia sebagai pencari dan pembelanja. Daniel Thorner yang ditulis oleh Kuntowijoyo berpendapat bahwa ekonomi petani merupakan sebuah kategori dalam sejarah ekonomi, yaitu dalam bidang produksi, masyarakat terlibat dalam produksi agrarian; penduduknya harus lebih dari separuhnya terlibat dalam pertanian; ada kekuasaan negara dan lapisan kekuasaannya; ada pemisahan antara desa dengan kota, jadi ada kota-kota dengan latar belakang desa-desa; dan satuan produksinya ialah keluarga rumah tangga petani (Kuntowijoyo, 2003: 95).

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi tahap heuristik, yaitu tahap mencari dan menemukan sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Pada tahap ini pencarian sumber antara lain dilakukan di Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, dan Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Langkah berikutnya adalah melakukan kritik sumber, untuk mengetahui apakah dari sumber satu dan sumber lainnya valid dan dapat dipercaya. Setelah sumber-sumber dikritik baik ekstern maupun intern. Langkah berikutnya adalah interpretasi dan dianalisis, baru kemudian dilakukan penulisan atau historiografi, yaitu merangkaikan fakta hingga menjadi tulisan sejarah.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Kopi di Priangan

Kopi pertama kali ditemukan pada tahun 850 oleh seorang gembala Arab di Mocha yaitu sebuah pelabuhan di daerah Yaman bernama Kaldi. Dari Arab kemudian menyebar ke belahan dunia (Yogaswara, 1991:1). Di negeri Belanda, minuman kopi ("*kahwa*") menurut bahasa

setempat) mula-mula di perkenalkan oleh Pieter van den Broecke pada 1616. Tidak lama kemudian minuman ini menjadi populer di negeri Belanda. Pada akhir abad ke-17, permintaan kopi di pasar perdagangan di Eropa terhadap kopi semakin meningkat. Untuk memenuhi permintaan pasar, VOC membeli kopi di pelabuhan Mocha dan menjualnya dengan harga tinggi, namun keuntungannya tidak signifikan dikarenakan terjadi persaingan dengan Turki. Untuk menghadapi persaingan, VOC mencoba untuk menghasilkan kopi sendiri. VOC kemudian mencoba menanam kopi di daerah Gunung Sahari Batavia (Jalan Ancol sekarang). Pada 1696, Gubernur Jenderal van Hoorn dan Zwaardecroon menerima biji kopi dari mertuanya yang bertugas di Malabar India. Saat ditanam di kebun milik Horn di sekitar Batavia dan Cirebon ternyata kopi yang dihasilkan sangat baik, sehingga mereka menyimpulkan di Tatar Sunda kopi dapat tumbuh baik. Ketika van Hoorn dan Zwaardecroon mengirimkan kopi Jawa ke Batavia sebagai bahan promosi untuk pasaran perdagangan ke Eropa, mereka berkeyakinan bahwa kopi Jawa akan mendapatkan hasil yang menjanjikan. Turunlah instruksi dari De Heren XVII kepada VOC untuk membudidayakan kopi di Pulau Jawa (Badan Pengembangan informasi daerah Kabupaten Bandung, 2003: 28).

Pada 1705, VOC menguasai seluruh wilayah Priangan, meskipun demikian VOC belum menempatkan Priangan sebagai daerah yang dapat diawasi langsung. Jabatan pengawas dipercayakan kepada pangeran Aria Cirebon sebagai *opziener* para bupati di daerah Priangan. Pada 1707, VOC menetapkan daerah Tatar Sunda (Batavia, Priangan, dan Cirebon) untuk melaksanakan penanaman wajib kopi. Wilayah Priangan meliputi Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura (Ekadjati, 1991: 2). Daerah Priangan akan dijadikan daerah percontohan pembudidayaan kopi untuk Pulau Jawa. Bibit kopi yang telah

diujicobakan kemudian dibagikan kepada para bupati untuk dibudidayakan di daerahnya masing-masing. Para bupati di Priangan memperoleh biji kopi hasil ujicoba di Batavia, sedangkan bupati Bandung dan bupati lainnya dari Priangan Barat dan Priangan Timur memperoleh biji kopi hasil uji coba dari Kesultanan Cirebon. Dengan demikian di daerah Tatar Sunda sistem pembudidayaan kopi dilaksanakan secara resmi.

a. Bandung

Pada 1712 Abrahan van Riebek mendarat di Pelabuhan Ratu sambil membawa benih kopi. Tanaman ini dicoba ditanam di lahan yang subur dan berhasil tumbuh dengan baik. Sejak abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda mendirikan perkebunan kopi di Keresidenan Priangan. Pieter Engelhard membuka perkebunan kopi di daerah selatan lereng Gunung Tangubanperahu. Panen kopi pertama pada 1807 hasilnya sangat memuaskan, sehingga pemerintah Hindia Belanda memperluas areal penanaman kopi di lereng Gunung Patuha, Mandalawangi, Galunggung, dan Malabar. Pembuatan lahan perkebunan kopi di pegunungan tersebut dilakukan dengan cara *swidden* atau tebang bakar. Selain itu, penduduk pun diwajibkan untuk menanam kopi di semua pemilik tanah pertanian; semua pemilik pekarangan; kebun; kebun buah-buahan; dan yang memiliki kolam ikan seluas $\frac{1}{4}$ bahu (± 500 *tumbak* atau 7.130 m²). Pada 1865, wajib kerja bagi pemilik tanah/tegalan adalah sebau sampai dua bahu atau 52 hari per tahun. Bagi yang memiliki setengah bau sawah/tegalan adalah 26 hari, dan memiliki seperempat bahu sawah/tegalan adalah 13 hari (Yogaswara, 1991:2-3).

b. Cianjur

Aria Wiratanu III merupakan bupati Cianjur I. Empat tahun setelah diberlakukannya penanaman kopi di Tatar Sunda (tahun 1711), ia berhasil menyettor

tanaman kopi² hampir 100 pon kepada VOC. Harga yang ia peroleh 50 gulden per pikul (1 pikul sama dengan 125 pon). Pada 1726, pembudidayaan kopi meluas ke dataran tinggi Priangan. Pada 1726, VOC berhasil menjadi penyalur kopi. Setengah hingga tiga perempat dari perdagangan kopi dunia berasal dari VOC yang setengahnya dihasilkan dari Priangan bagian barat yaitu Cianjur (Breman, 2014, 61). Aria Wiratanu III juga mendapat sebutan sebagai penguasa pribumi pertama yang berhasil menyerahkan kopi kepada VOC. Aria Waratanu III mendapat hadiah dari Gubernur Jenderal Van Swoll berupa Distrik Jampang yang terletak di bagian timur Cianjur Selatan. Pada 1713-1718 Aria Wiratanu III juga mendapat hadiah dari Gubernur Jenderal Zwaarde Kroon berupa daerah Segarakidul yang terletak di bagian barat Cianjur Selatan atau sebelah barat distrik Jampang hingga perbatasan

Banten. Aria Wiratanu III juga mendapat sebutan sebagai penjual besar kopi yang terkenal (Dienaputra, 2000: 136). Dengan bertambahnya wilayah Cianjur maka Cianjur pada masa pemerintahan Aria Wiratanu III mengalami perluasan wilayah. Dengan demikian penanaman kopi pun meluas. Untuk itu Wiratanu III dapat menghasilkan uang bagi pemerintah Belanda dan dapat pula meningkatkan taraf hidup rakyat Cianjur pada waktu itu. (Suryaningrat, 1982: 48-49).

Aria Wiratanu III dapat mengurus kopi dari tanah miliknya dan tanah rakyatnya. Dari pengurusan kopi tersebut, Aria Wiratanu III dapat menyetorkan kopi ke VOC paling banyak dibandingkan dengan setoran dari kabupaten lain (Suriadiningrat, 1982: 116). Budi daya kopi semasa Wiratanu III berkuasa sangat menguntungkan VOC, sehingga VOC memberikan sejumlah uang untuk meningkatkan penghasilan bupati.

² Sejak abad ke-17, VOC terlibat perdagangan kopi di Laut Merah dan Teluk Persia. Pada akhir tahun 1707, Gubernur Jenderal J. van Hoorn ia memberitahukan kepada atasannya telah membagikan tanaman kopi kepada pelbagai kepala pribumi dari Batavia sampai Cirebon, namun di dataran rendah tanaman kopi tidak berkembang. Ia pun mengalihkan tanaman kopinya ke Karawang dan pegunungan yang daerahnya lebih tinggi, ternyata hasilnya lebih memuaskan (Breman, 2014: 61).

Tanaman kopi ini biasanya tumbuh di atas tanah yang subur dengan ketinggian antara 5.000-6.000 m di atas permukaan laut. Biji kopi yang ditanam awal mulanya diperkenalkan oleh seorang warga Negara Belanda bernama Abraham van Riebek (1712). Ia mendarat di Pelabuhan Ratu sambil membawa biji kopi dan langsung ditanam dan dapat menghasilkan kopi yang bagus. Sejak abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda mendirikan perkebunan kopi di Keresidenan Priangan.

Keberhasilan menanam kopi di perkebunan Priangan kemudian dilanjutkan di daerah selatan Gunung Tangkuban Perahu. Pada panen pertama 1807 hasilnya sangat memuaskan sehingga pemerintah Hindia Belanda menambah areal penanaman kopi di lereng Gunung Patuha, Mandalawangi, Galunggung, dan Malabar. Penduduk juga diwajibkan menanam kopi di semua lahan tanah pertanian, semua milik tanah pekarangan, kebun buah-buahan, kolam ikan yang luasnya $\frac{1}{4}$ bahu atau 7.130 m² (Yogaswara, 1991:2).

c. Sukapura

Ngabehi Wirawangsa diangkat oleh Sultan Agung sebagai bupati Sukapura atas jasanya dalam menumpas pemberontakan Dipati Ukur. Ia bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha. Oleh Sultan Agung Wiradadaha diberi kekuasaan untuk memimpin wilayah terluas dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Parakanmuncang (Falah, 2010: 28).

Raden Tumenggung Wiradadaha memerintah dari tahun 1674 hingga 1727 dan mendapat sebutan *Dalem Sawidak*. Dalam mengelola administrasi pemerintahannya, ia membagi ke dalam empat urusan kewenangan yang dipercayakan kepada empat patih. Bukti-bukti mengenai prestasi pemerintahan *Dalem Sawidak* pada rakyatnya yaitu di bidang pesawahan dan saluran irigasi. Seiring dengan diserahkan wilayah Priangan dari Mataram kepada VOC secara tidak langsung Sukapura masuk ke dalam kekuasaan bangsa asing.

Pada 9 Februari 1705, Kumpeni mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai bupati Priangan, dengan demikian Sukapura masuk ke dalam wilayah Keresidenan Priangan. Penerapan sistem monopoli di Priangan menjadi target yang dicapai kumpeni atas kekuasaan Sukapura. Target yang menjadi monopoli di Priangan adalah kayu, kopi, tarum/nila, kapas, lada, kapulaga, dan produk lainnya. Penerapan sistem monopoli tersebut dilakukan dengan sistem *nenгах* dalam tradisi budidaya padi (Salim, 2014: 113). Dimana pihak kumpeni (kreditur) memberikan utang benih kepada pribumi, kemudian meminta penjualan setengah dari hasil panen pribumi dengan harga rendah. Pada periode awal penerapan sistem monopoli kumpeni, Sukapura adalah kabupatian paling penting dengan kontribusi hasil bumi terbesar. Produk unggulan hasil bumi kabupaten Sukapura adalah kapas, indigo, dan lada. Produk tersebut tidak lepas dari wilayah Kabupaten Sukapura yang begitu luas dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Sampai tahun 1830, 65 % wilayah Sukapura berupa hutan, dari luas wilayah tersebut tanaman kopi tidak begitu populer (Salim, 2014: 117).

Sepeninggal Dalem Sawidak, ia digantikan oleh putranya yaitu R. Subamanggala bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha V. Semenjak Wiradadaha V berkuasa, tidak banyak prestasi yang dicatat oleh Kumpeni. Dari catatan Kumpeni bahwa dari tahun 1820-1832 Kabupaten Sukapura sama sekali tidak menyerahkan hasil budi daya kopi. Padahal kabupaten lainnya sedang bergairah menanam kopi guna menyokong agenda monopoli kumpeni. Akibatnya pada 1811, kolonial memutuskan kepemimpinan Wiradadaha sekaligus menghapus Kabupaten Sukapura dari peta kolonial dan menggabungkan ke dalam Kabupaten Limbangan. Sejak tahun 1913, secara resmi Kabupaten Sukapura berubah nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya.

d. Sumedang

Pada 1791, Raden Aria Surianagara dikukuhkan menjadi bupati Sumedang dan mendapat gelar tumenggung. Bertepatan dengan diangkatnya Gubernur Jenderal Daendels sebagai gubernur Jenderal Hindia Belanda terjadilah peristiwa Cadas Pangeran. Peristiwa tersebut berkaitan dengan pembuatan Jalan Raya Pos (Grote Postweg). Alasan pembangunan Jalan Raya Pos untuk kelancaran pengangkutan kopi. Pada masa pemerintahan Tumenggung Surianagara, kabupaten Sumedang mengalami kemajuan di berbagai bidang. Hal itu bisa dilihat dari peningkatan produksi kopi, yang semula 2.500 pikul bisa ditingkatkan menjadi 8000 pikul bahkan pernah mencapai 12000 pikul. Waktu tempuh pengangkutan juga dapat diperpendek dari 22-66 hari menjadi 2-6 hari. Hal itu disebabkan ada perubahan rute yang tadinya dari Cikao menjadi langsung ke Karangsembung. Tumenggung Adipati Surianagara juga tidak segan-segan pergi ke desa guna mengontrol keadaan kebun kopi rakyat. Ia memberikan pelajaran bagaimana cara menanam, mengurus, dan memilih tanah yang baik untuk kebun kopi, sehingga tanah Sumedang yang sebenarnya tidak cocok untuk ditanami kopi mampu memberikan hasil tanaman kopi yang sangat baik (Lubis, 2008: 162-163).

e. Limbangan

Limbangan merupakan sebuah kabupaten yang secara *de facto* dibawah kekuasaan Sumedang. Dilihat dari luas wilayahnya, Limbangan lebih sempit dan jumlah penduduknya pun lebih sedikit apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Sukapura. Ketika Sultan Agung melakukan reorganisasi wilayah di Priangan Timur, Limbangan termasuk dalam pecahan wilayah, sebab menurut Ranga Gempol, Limbangan hanya merupakan sebuah kampung, disebabkan hanya mempunyai 200 *umpi*. Pada 1705, Limbangan dilepaskan dari

Kabupaten Sumedang dan menjadi kabupaten tersendiri (Warjita, 2009: 5).

Selama Daendels berkuasa, ia melakukan *hervorming*, yaitu pengaturan kembali bidang pemerintahan, pertanian dan perkebunan kopi. Ia menghapus Kabupaten Limbangan, batas wilayahnya dimasukkan ke Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Sumedang. Alasannya batas wilayah Kabupaten Limbangan terdiri dari pecahan-pecahan kecil yang terletak di wilayah kabupaten lain dan tidak menghasilkan kopi. Rakyatnya yang berada di pecahan-pecahan kafling tersebut tidak mau dipekerjakan di kebun kopi yang berdekatan dengan kabupaten lain. Untuk memungkinkan rakyat tersebut dipekerjakan di kabupaten terdekat, satu-satunya jalan memasukkan kafling yang bersangkutan ke kabupaten yang berbatasan. Tanah Limbangan yang kurang cocok untuk tanaman kopi, dari tahun ke tahun hasilnya menurun, hingga akhirnya tidak ada tanaman kopi (Surianingrat, 1985: 186).

2. Pasang Surut Kopi di Priangan

Pangeran Aria Cirebon meninggal tahun 1723. Dengan meninggalnya Pangeran Aria Cirebon, VOC tidak mengangkat penggantinya, melainkan mengubah kebijakan penyerahan wajib menjadi penanaman wajib kopi dan seluruh hasilnya diserahkan kepada VOC. Para bupati sebagai tangan kanan kumpeni dalam urusan kopi mendapat tambahan penghasilan, sebaliknya rakyat yang membudidayakan kopi mendapat penderitaan (Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2003: 30).

Memasuki pertengahan abad ke-18, harga kopi di pasaran Eropa terus naik. Hal itu mendorong kebutuhan kopi di pegunungan Priangan ikut naik. Tanaman kopi yang dibudidayakan di pekarangan rumah petani mulai tidak mencukupi kebutuhan. Untuk memenuhinya, pemerintah VOC menganjurkan agar penanaman kopi bukan hanya di lahan pekarangan milik petani melainkan dapat

dilakukan di lahan di sekitar kampung. Menanam kopi juga dilakukan di kebun-kebun liar dengan cara membabat habis tanaman liar untuk dibuka lahan tanaman kopi, dan menanam kopi yang masih muda. Untuk mendapatkan manfaat ekonomis, di antara pohon kopi ditanami padi. Setelah memakan waktu empat tahun, tanaman kopi di kebun liar sudah dapat dipetik. Penyetorannya dilakukan dengan cara yang sama dengan penyetoran kopi yang dilakukan oleh petani, yaitu diserahkan kepada kepala setempat atau kepada pedukuhan pusat.

Untuk menampung hasil panen kopi, pada pertengahan abad ke-18, VOC membangun gudang-gudang kopi yang terletak di tepi Sungai Citarum dan Cikao. Dari gudang, kopi diangkut dengan perahu hingga ke pantai. Sesampai di halte terakhir, perahu tidak dapat melaju dengan dua arus, pengangkutan pun diangkut melalui jalan darat dengan hewan beban yang memakan waktu dua bulan (Bremen, 2014: 65). Pada 1744, penduduk wajib menanam dan menyetor kopi ke tempat pengumpulan yang ditunjuk, wajib membangun gudang, dan wajib jalan, dan pekerjaan lainnya yang diperintah oleh VOC.

Sebelum diangkut dengan hewan beban, kopi terlebih dahulu ditimbang untuk membagi jumlah kopi yang akan diangkut. Hewan beban akan mengangkut seperempat pikul gunung (55,5 pon). Dalam satu hari seekor kerbau dapat mengangkut dua kali. Pada abad ke-18, Cianjur berkembang menjadi gudang kopi terpenting bagi VOC. Pada abad itu jalan yang dilewati masih merupakan jalan setapak. Dengan meningkatnya jumlah kopi yang akan dikirim, perbaikan jalan mulai dilakukan. Alat angkut yang tadinya menggunakan pikulan, kemudian berubah menjadi angkutan yang ditarik dengan kerbau atau kuda.

Kebutuhan akan kopi di pasaran Eropa yang semakin meningkat pada 1763, saudagar Cina ikut berperan dalam penjualan kopi. Kemunculan saudagar

Cina tersebut seolah membuka peluang usaha mereka di kala VOC menurunkan harga kopi dan membelinya dengan harga rendah. Pemilik kopi yang terus merugi tidak mau lagi menjual kopinya kepada VOC, justru mereka mulai menjual hasil panennya ke pasar di Batavia. Di sinilah saudagar Cina mulai membuka peranan. VOC yang merasa ada persaingan dalam penerimaan hasil panen kopi. VOC pun melarang kegiatan saudagar Cina untuk membeli hasil panen kopi dan menganggapnya sebagai monopoli. Meskipun mendapat larangan dari VOC, saudagar Cina tetap melakukan perbedaan harga baik yang ditetapkan oleh VOC atau pun harga yang dipatok oleh (pedagang gelap) saudagar Cina. VOC yang tidak mau membayar harga kopi lebih tinggi, menyebabkan petani untuk tidak menyetorkan hasil panennya kepada VOC. Untuk menghindari supaya tidak menyetorkan ke gudang VOC, petani lebih memilih membuang hasil panennya atau menimbunnya agar jangan sampai membawanya ke gudang. Bahkan ada pula petani yang menyerahkannya ke tengkulak dengan harga yang lebih tinggi daripada kepada VOC. Adanya penurunan harga kopi secara drastis, telah memicu petani untuk melaksanakan transaksi ilegal.

Para kepala pribumi seharusnya mengawasi pengumpulan kopi dari para petani sampai masuk gudang VOC. Namun kenyataannya dalam pengangkutan kopi ke gudang VOC, isi pikulan seringkali berpindah tangan. Seiring semakin mendekati pantai harga yang ditawarkan oleh tengkulak harganya semakin tinggi. Hal itu memicu maraknya penjualan kopi ke pihak tengkulak. Seorang bupati yang lalai menyetorkan kopinya tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, akan mendapatkan tuduhan bahwa ia dan bawahannya telah melakukan transaksi kepada pihak swasta. Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam hal penjualan kopi tersebut, VOC menerapkan pelarangan bagi pihak swasta untuk tinggal di wilayah Priangan.

Pada akhir abad ke-18, setoran kopi terus meningkat hal itu didorong oleh kebutuhan di Negeri Belanda yang terus meningkat. Pada saat itu kopi mulai dinikmati oleh masyarakat dari kalangan bawah (Breman, 2014: 69). Namun di balik melonjaknya permintaan kopi di Negeri Belanda penduduk banyak yang berpindah tempat tinggal. Mereka mencari beban kerja yang lebih ringan. Pilihan tempat tinggal yang mereka tuju adalah ke Banten dan Jawa Tengah, padahal tempat tersebut lebih gersang dibandingkan dengan pegunungan Priangan yang tanahnya subur. Alasan penduduk berpindah tempat tinggal, karena merasa berat dengan adanya setoran wajib yang ditetapkan oleh VOC.

Dengan adanya perpindahan penduduk tersebut, VOC tidak bisa menerima, VOC menyebutkan bahwa petani yang meninggalkan daerahnya adalah pembelot, mereka perlu diberi hukuman karena telah merugikan perkebunan.

a. Daendels

Pada 1799 VOC bubar, kekuasaan atas Pulau Jawa diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tetap melanjutkan upaya-upaya Kumpeni dalam urusan penanaman kopi, di antaranya mengeluarkan Instruksi No. 5 tahun 1800, mengenai penanaman kopi supaya dilakukan pada bulan-bulan November, Desember, dan Januari, agar hasilnya baik. Setiap keluarga juga diharuskan menanam 250 pohon. Selain itu juga keluar Instruksi No. 9 yang isinya bupati dan opsiner betul-betul membayarkan uang kopi kepada rakyatnya dengan lancar. Pemerintah Hindia Belanda juga mengatur soal harga, upah, ongkos angkut, dan kuota penanaman. Selain itu Pemerintah Kolonial juga mengeluarkan peraturan yang isinya agar petani wajib menanam pohon kopi tambahan, namun para petani kopi mengeluh tidak mempunyai waktu untuk merawat pohon kopi secara teratur dan saksama.

Pada 1802, Pemerintah Hindia Belanda kembali mengeluarkan peraturan yang berisi mengenai penurunan jumlah pohon menjadi 500, usulan tersebut juga ditolak. Pada 1808 Lawick, seorang pengusaha perkebunan kopi mengusulkan agar petani menanam pohon kopi sebanyak-banyaknya bila perlu diadakan perluasan lahan di seluruh kabupaten. Usulan Lawick juga tidak dihiraukan, yang ada justru para petani yang meninggalkan tanah perkebunan semakin bertambah.

Pada 1808, Daendels tiba di Pulau Jawa dan diangkat menjadi Gubernur Jenderal untuk Pulau Jawa. Untuk meningkatkan hasil panen kopi, Daendels melakukan reformasi birokrasi. Salah satu *perfectur* yang dibentuk oleh Daendels adalah *Prefectur Preanger* yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan kabupaten tersebut dalam menghasilkan kopi. Dengan demikian Kabupaten Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang digabungkan dengan Batavia dengan nama *Jacatrasche en Preanger-Regentschappen*. Sementara daerah Sukapura, Limbangan, dan Galuh yang merupakan daerah minus kopi digabungkan dengan Cirebon dengan nama *Kesultanan en Cheribonsche Preanger-Regenchappen* (Ekadjati, 1993: 253). Selain melakukan reformasi birokrasi, Daendels lebih memilih untuk bekerja sama dengan para bupati. Bupati diposisikan sebagai bawahan dari pejabat Belanda. Daendels beranggapan bahwa untuk meningkatkan kas pemerintah Kolonial, tanpa kerja sama dengan bupati keinginan untuk meraih laba terancam gagal. Dengan demikian setiap habis panen, petani harus menyetorkannya kepada bupati. Berkaitan dengan kopi di Cianjur (Priangan), Daendels berhasil meniadakan masalah bagi hasil kepada para bangsawan. Namun dari hasil penjualan kopi, Daendels memberikan persentasi kepada bupati dan bawahannya. Petani yang menyerahkan hasil panen kopi kepada bupati, bupati akan mendapatkan

2,5 gulden dari setiap *rijkdaalder* (ringgit, 2,5, yang diperoleh bupati dari setiap pikul kopi), dan 12 *suiten* diperuntukkan bagi kepala bawahannya. Itulah imbalan yang diterima bangsawan pribumi atas keterlibatan mereka dalam tananam kopi.

Dengan peran serta bupati, pada 1808, wajib tanam kopi meningkat tajam. Jumlah pohon di Jawa bertambah lebih dari 45 juta batang dari 26.956.467 tiga tahun kemudian mencapai 72.669.467. Selain bekerja sama dengan bupati, Daendels mengangkat inspektur jenderal urusan kopi yang dijabat oleh C.von Winckelman dengan tugas urusan pemenuhan kewajiban pribumi dan hanya terbatas di Kabupaten Priangan. Pada tahun itu, Daendels juga mengharuskan anak-anak pada usia 14 tahun dapat dipekerjakan, mereka harus bekerja sebagai tenaga pembantu orang tuanya.

Pada 1809, Daendels menaikkan setoran petani kepada bupati menjadi seperlima dari hasil panen. Jumlah setoran yang ditetapkan Daendels terus naik dibandingkan dengan setoran yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian kenaikan setoran kepada bupati tersebut dibebankan kepada rakyat, dan tanpa mengurangi beban kas kolonial. Pada 1809, Daendels melakukan penataan pemukiman bagi penduduk. Daendels menghindari pola pemukiman yang menyebar. Penduduk diperintahkan untuk tinggal di desa yang minimal jumlah penduduknya ditentukan. Pemukiman dengan penduduk kurang dari 6 kepala keluarga (KK) tidak diperbolehkan dan mereka harus bergabung dengan lokasi yang lebih besar. Di Cianjur untuk mengurus kependudukan dipercayakan kepada pemuka agama. Pemuka agama diberi kepercayaan selain yang berkaitan dengan keagamaan seperti memimpin ibadah, membacakan Al-Qur'an, menghadiri selamatan juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai pencatat kelahiran, kematian, dan perkawinan di sekitar yang mereka tempati. Dengan tugas-tugas tersebut pemuka agama di Cianjur diakui

sebagai tokoh pemerintahan pribumi. Namun sayangnya pada 1810 ada pelarangan bagi para pemuka agama di Cianjur untuk menunaikan ibadah haji di Mekah.

Untuk mencegah menurunnya hasil tanaman kopi, pada 1810 Daendels memerintahkan bagi setiap keluarga diwajibkan untuk menanam 200 bibit setiap tahun, karena pohon yang sudah tua akan mati, dan pohon bisa berbuah hanya bertahan lima tahun. Pengadaan pohon pengganti harus dijaga seperlima dari jumlah pohon yang ada setiap tahun. Penyetoran hasil panen kopi, dilakukan pengawasan dengan melibatkan pemerintah. Pajak dicatat dalam register. Buku kopi harus dibuat dan diperlihatkan oleh atasan kerja mereka. Untuk menghindarkan agar penduduk tidak meninggalkan tempat tinggal akibat beban kerja yang terlalu berat, mereka dicarikan jalan keluar yaitu diizinkan menanam kopi di lahan yang kurang cocok, dengan demikian penduduk yang akan melarikan diri dapat ditekan. Pada 1810, panen kopi mengalami peningkatan hingga 120.000 pikul (Bremn, 2014: 111).

Untuk memerangi kecurangan dan kesemrawutan, Daendels menyeragamkan berat pikulan setoran kopi. Untuk meringankan beban pengangkutan, dibangun gudang-gudang kopi, melarang memungut ongkos terhadap petani, dan memerintahkan pembayaran uang kopi langsung pada saat penyetoran kepada petani. Untuk mensejahterakan para bupati, bupati menerima komisi tersendiri yaitu satu *rijksdaalder* per pikul seberat 128 pon. Jauh lebih ringan daripada petani yaitu 225 pon per pikul. Dari komisi yang diterima bupati, seperempatnya diserahkan kepada kepala bawahannya, dan utang-utang bupati kepada pemerintah Kolonial dihapuskan.

Dilihat dari hasil panen kopi dalam kurun waktu antara 1808-1821, penghasilan kopi yang paling tinggi terjadi pada tahun 1810 yaitu sebanyak 93.057 pikul dan paling sedikit pada tahun 1811

yaitu sekitar 19.675 pikul. Dalam wajib tanam kopi tersebut ada yang wajib tanam di tanah milik rakyat dan ada yang ditanam di tanah milik swasta. Namun hasil tanaman kopi yang ditanam di tanah milik swasta hasilnya kurang memuaskan apabila dibandingkan dengan hasil tanaman kopi yang ditanam di tanah rakyat. Keterlibatan rakyat dalam menanam kopi disebabkan harga kopi waktu itu termasuk tinggi maka dapat mendorong tingginya upah. Dengan mahalnya harga kopi, pemerintah kolonial pun harus mengeluarkan uang banyak antara lain guna melakukan pembelian kopi-kopi dari rakyat, mendirikan gudang-gudang kopi, dan biaya ongkos angkut dari perkebunan ke gudang-gudang. Untuk pengangkutan kopi dari perkebunan yang jauh lokasinya digunakan alat angkut pedati yang ditarik kerbau yang biasa digunakan untuk membajak sawah. Untuk pengangkutan menggunakan pedati bisa mencapai 7 sampai dengan 10 pikul dengan jarak tempuh kira-kira 7 sampai 9 km. Adapun jarak tempuh di atas sepuluh kilometer menggunakan pedati memakan waktu antara satu sampai dua minggu. Hal tersebut dapat memungkinkan adanya penghadangan pencurian di tengah perjalanan.

Namun tidak semua petani memanfaatkan pedati untuk mengangkut hasil panen kopi ke gudang. Apalagi seandainya binatang yang ia miliki hanya terbatas untuk membajak sawah. Mereka lebih memilih menyetorkan sendiri dengan cara dipikul meskipun mereka akan mendapat hasil lebih sedikit.

Kondisi jalan di Priangan tidak seluruhnya mulus, bahkan banyak ditemukan jalan-jalan terjal, sehingga pengangkutan barang dirasakan sangat menyulitkan. Pengangkutan barang menggunakan gerobak ongkosnya pun sangat mahal, sehingga akan berpengaruh pada upah tenaga kerja. Bagi yang bepergian tidak jauh dengan jalan pos dapat menggunakan kereta pos, dan yang bepergian dekat cukup menggunakan

pedati. Akan tetapi apabila kondisi jalan sangat buruk, tidak memungkinkan pengangkutan kopi berjalan sesuai jadwal. Kapal sebagai pengangkut kopi ke luar wilayah harus menunggu lama di pelabuhan, sebaliknya kopi-kopi di gudang-gudang penampungan, baik gudang di pelabuhan atau pun gudang di pedalaman mutunya menjadi turun karena menunggu lama³.

Selain diperbolehkan penanaman kopi di lahan-lahan liar, juga dilakukan pengelompokan daerah sebagai penghasil kopi. Selain itu Daendels juga membangun infrastruktur jalan raya, berupa jalan raya pos yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur-Bandung-Sumedang.

Daerah Jawa Barat yang dilewati Jalan Raya Pos adalah Serang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Cirebon (Dienaputra, 2000:139). Ia juga membangun jembatan untuk transportasi berat yang menggunakan kerbau/kuda. Salah satu jembatan yang melintas di atas Sungai Cisokan dan Sungai Citarum didirikan tempat penyeberangan khusus ferry perahu tambang.

Pengangkutan kopi yang jumlahnya terus meningkat dari pegunungan Priangan ke pantai, pada akhirnya menimbulkan masalah, sebab jalan yang biasa dilalui oleh pengangkut beban binatang pada musim hujan tidak dapat dilalui. Hal tersebut tentu saja sangat menyulitkan para petani dan rakyat. Adapun pembangunan jalan raya pos hanya berlaku untuk kalangan tertentu. Pengangkut kopi tetap tidak diperkenankan melewati jalan raya pos tersebut dengan alasan jalan akan cepat rusak.

Upaya untuk terus meningkatkan tanaman kopi, bukan hanya bupati yang mendapatkan bonus sebesar satu *rijksdaalder* (ringgit, 2,5 gulden) dari setiap pikul kopi yang berasal dari wilayah kerjanya, namun seperempatnya

adalah bagian dari kepala bawahannya seperti patih dan *cutak*. Pendapatan tersebut bagi *cutak* nilainya tergolong cukup besar, namun bagi kepala pribumi dinilai rendah. Sehingga bagi kepala rendahan ia akan menarik uang kopinya dari petani, karena mereka tidak menerima ganti rugi. Pejabat Eropa juga mendapat bagian dari persentase kopi. Komitir akan mendapat seperempat *rijksdaalder* dari setiap pikul, dan pengawas akan mendapat seperempat *rijksdaalder*. Untuk membayar sederet kepala rendahan tersebut, Daendels membebani petani dengan menaikkan cukai yang tadinya sepersepuluh menjadi seperlima (Bremen, 2014: 174).

Rupanya keputusan Daendels untuk menaikkan hasil tanaman kopi setiap tahun hanya untuk mengisi kas pemerintahan Belanda serta untuk memberikan komisi kepada para pejabat baik untuk bupati, kepala bawahan, dan pejabat Belanda lainnya. Di tingkat yang paling bawah, dalam hal ini penduduk dan petani, Daendels membebani dengan penderitaan. Di satu sisi Daendels meningkatkan sarana dan prasarana namun di lain sisi mengambil tenaga rakyat sebagai penyedia pekerja untuk membangun infrastruktur, baik jalan maupun jembatan. Sebenarnya Daendels akan membayar pekerja yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan, tetapi karena kekurangan anggaran maka dia tidak dapat menepati janjinya. Rakyat yang dibebani pekerjaan pembangunan jalan tersebut sangat berat dan melelahkan apalagi pekerjaan tersebut memakan waktu berbulan-bulan akibatnya banyak penduduk yang mati dan melarikan diri. Untuk menekan supaya penduduk tidak ada yang melarikan diri Daendels mengeluarkan peraturan yang berisi, bahwa seluruh penduduk suatu distrik wajib ikut serta dalam kerja pengabdian, apabila masih terjadi pekerja yang melarikan diri, mereka akan ditempatkan ke tempat yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Peraturan wajib kerja

³(<http://pustaka.unpad.ac.id>).

bukan hanya untuk pembuatan jalan melainkan untuk penjagaan pos-pos dan perkantoran Belanda. Tindakan Daendels menekan penduduk dengan tenaganya tanpa mempedulikan fisik dan kesehatannya. Tuntutan pekerjaan yang begitu berat tidak didukung bayaran yang setimpal. Jangankan untuk membantu kehidupan keluarga petani dan rakyat, untuk diri pekerja sendiri pun tidak diperlihatkan, tidak sedikit dari para pekerja tidak pulang ke rumahnya, ada yang melarikan diri atau pun meninggal dunia. Daendels mengakhiri masa tugasnya sebagai gubernur jenderal pada 1811.

b. Raffles

Kepemimpinan Daendels berakhir seiring Pemerintah Hindia Belanda jatuh ke tangan Inggris. Pemerintah Inggris mempercayakan Thomas Stamford Raffles (1811-1816) sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa. Sebenarnya Raffles sejalan dengan pemikiran Daendels, yaitu daerah Pegunungan Priangan merupakan sumber utama keuangan pemerintahan jajahan. Selama menjabat sebagai gubernur jenderal, Raffles membuat peraturan mengenai sewa tanah (*landrent*). Untuk melindungi hasil kopi, di Priangan dibebaskan dari *landrent*. Bersamaan dengan itu, di Benua Eropa terjadi Perang Napolen. Dampak dari perang tersebut, Raffles menemukan gudang-gudang di Priangan yang dipenuhi dengan kopi. Adanya penumpukan kopi di gudang tersebut karena kurang lancarnya penjualan akibat adanya pemblokiran Perang Napoleon (Breman, 2014, 121). Raffles akhirnya memerintahkan kepada kepala gudang untuk tidak menerima setoran kopi, kopi untuk diekspor masih memungkinkan dalam jumlah sedikit yaitu ke Amerika. Di masa pemerintahan Raffles, ia tidak memperbolehkan saudagar Cina serta bangsa lainnya untuk bermukim di Priangan.

Di Priangan, Thomas Stamford Raffles memperkenalkan istilah keresidenan. Sejak saat itulah dikenal istilah residen sebagai

pemimpin keresidenan yang berkedudukan di ibukota keresidenan. Pada abad ke-19, luas Keresidenan Priangan kurang lebih 21.524 km², yang berbatasan dengan sebelah utara Keresidenan Batavia dan Cirebon, sebelah timur berbatasan dengan Keresidenan Cirebon dan Banyumas, sebelah selatan dan barat daya adalah Samudera Hindia, dan sebelah barat adalah Keresidenan Banten. Batas wilayahnya adalah sebelah utara rangkaian pegunungan Salak-Gede dan Burangrang-Tangkuban Perahu, sebelah timur Sungai Citanduy, sebelah barat adalah Pelabuhan Ratu dan Ciletu, dan sebelah tenggara adalah Cilauteureun. Wilayah Priangan juga merupakan daerah vulkanis karena dibentuk oleh gunung-gunung berapi dengan ketinggian antara 1.800 hingga 3.000 m di atas permukaan laut (Muhsin, 2008: 14-15).

Selama kepemimpinannya, Raffles melakukan penataan infrastruktur jalan, meskipun pembangunannya sebatas membangun jalan-jalan baru ke pedalaman pada beberapa ruas jalan raya pos yang telah dibangun Daendels. Selain itu, Raffles membentuk daerah *Preangerlanden* yaitu menggabungkan daerah-daerah atas bentukan Daendels menjadi satu. Daerah-daerah tersebut adalah Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang yang dibentuk pada 1815. Pada 1816, daerah *Preangerlanden* menjadi *Preanger Regentshappen*. Pada masa pemerintahan Raffles inilah Keresidenan Priangan dibentuk disusul dengan pembentukan karesidenan-karesidenan lainnya seperti Banten, Buitenzorg, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Kedu, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Jepara dan Yuwana, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, serta Probolinggo, dengan Basuki dan Panarukan.

c. Van der Capplen

Kekuasaan Inggris di Pulau Jawa berakhir tahun 1816. Pihak Inggris mengembalikan kekuasaan atas Pulau Jawa kepada pemerintah Hindia Belanda. Atas

serah terima tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengirimkan tiga komisararis jenderal yaitu Mr. C. Th. Elout, G.A.G. Ph Baron van der Cappelen, dan A.A Buykes, untuk mengambil alih kekuasaan Inggris dan mengatur pemerintahan selanjutnya. Setelah kira-kira bertugas dua setengah tahun jabatan komisararis jenderal dihapuskan. Pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal van der Cappellen.

Seiring dengan dibukanya jalan pos, Van der Capellen menyadari pentingnya peranan bupati untuk keberhasilan pemerintahan Kolonial. Ia mengangkat kedudukan bupati di Jawa termasuk di Jawa Barat dari status pegawai menjadi kepala daerah. Kedudukannya berada di bawah *assisten resident* yang berfungsi sebagai penasehat bupati. Dengan demikian dalam lingkungan pemerintahan, bupati adalah saudara mudanya asisten residen (Ekadjati, 1992: 289).

Van der Cappelen menilai mengenai persentase dari hasil penanaman kopi yang diberikan kepada bupati dinilai terlalu kecil. Itulah sebabnya pada 1820, Van der Cappelen mengeluarkan peraturan yang isinya: Residen harus memperlakukan bupati sebagaimana adiknya; merinci yang menjadi tanggung jawab pribumi seperti meningkatkan pertanian, memperbaiki sarana transportasi, menindak perbuatan kejahatan, dan membuat register (Bremen, 2014: 185). Van der Cappelen beranggapan bahwa kepala distrik menjadi pemerias karena mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali menambah penghasilan mereka yang minim dengan cara-cara terlarang. Pada 1821, Inspektur Keuangan Van Haak dipercaya untuk melakukan penelitian di Limbangan. Dalam penelitian ia menyimpulkan bahwa ada ketimpangan antara jumlah pohon yang ditanam dengan jumlah keseluruhan yang produktif. Perbedaan jumlah itu berarti bahwa Keluarga yang mendapat beban tugas dalam penanaman kopi tidak memenuhi

norma 1.000 pohon per tahun yang masih berlaku bagi mereka. Penyebab tidak terpenuhinya disebabkan pada masa pemerintahan Inggris banyak kebun yang dirusak atau ditelantarkan sehingga produktivitasnya terganggu (Bremen, 2014: 187). Dengan merebaknya wabah kolera pada 1822, petani kopi menjadi korbannya. Pasalnya turunnya produksi beras dan melambungnya harga memicu penduduk Priangan kekurangan beras. Apalagi petani kopi waktunya tersita untuk penanaman kopi dan tidak ada waktu lagi untuk menanam padi, kelaparan pun tidak dapat dihindari.

d. Van den Bosch

Kepemimpinan Van der Cappellen berakhir pada 1826, ia digantikan oleh Van den Bosch. Pemberlakuan sistem Tanam Paksa oleh Van den Bosch pada 1830, memaksa rakyat petani di sebagian besar wilayah Jawa melakukan penanaman dan penyeteroran dari berbagai jenis tanaman untuk keperluan ekspor pemerintah Kolonial. Van den Bosch dikenal sebagai peletak dasar Tanam Paksa menekankan untuk mendahulukan penanaman nila daripada kopi. Namun pada 1833, penanaman nila mengalami kegagalan, dan rakyat yang harus menanggungnya, sehingga penanaman kopi kembali mendapat prioritas.

Masa kepemimpinan Van den Bosch prospek kopi kembali meningkat. Seiring dengan meningkatnya permintaan kopi di pasar Eropa, Van den Bosch menginstruksikan penanaman kopi ditambah menjadi 40 juta pohon per tahun. Penanamannya dibagi ke dalam daerah perbukitan di barat, tengah, dan timur Pulau Jawa. Namun penduduk sudah mulai enggan untuk menanam kopi. Pemerintah Kolonial memperkirakan dengan produksi 100 juta pikul akan dipanen lebih dari 263 juta pohon. Dengan perkiraan satu pohon kopi akan berbuah sepertiga pikul. Kebutuhan lahan yang luas, tidak lagi tersedia di dekat tempat tinggal petani. Jadi perluasannya mengarah ke tempat yang

lebih tinggi, dengan ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter. Lahan tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pembabatan hutan, sulitnya medan, gangguan cuaca, dan binatang buas menghampiri para pembabat hutan. Tata cara penanaman kopi pada masa pemerintahan Van den Bosch dilakukan kurang cermat, kondisi rawan longsor pun seolah dipaksakan dan penanaman terburu-buru. Sesuatu yang terburu-buru tentunya akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik.

Pada 1866-1867, Van Rees tanggal di Priangan selama enam bulan, ia mengumpulkan keterangan tentang penanaman kopi, mobilisasi tenaga kerja, dan campur tangan para bangsawan di Priangan. Menurutnya penanaman dan penyeteroran kopi didasarkan kerja paksa. Penanaman kopi tahun 1856 yang menghasilkan 70 juta pohon yang berbuah, sejak itu disusul dengan penurunan, bahkan tahun 1866, para pekerja tidak punya pilihan. Mereka tinggal di kebun karena jaraknya jauh dari rumahnya. Penghasilan para petani sudah naik turun, dan kadang tidak mendapatkan upah. Van Rees kemudian mengusulkan untuk diadakan reformasi, yaitu membebaskan penduduk dari beban kerja pengabdian. Sejak awal abad ke-19, pembuat kebijakan kolonial telah mencoba mengurangi kekuasaan bupati yang sewenang-wenang, namun para bupati tidak menginginkan adanya reorganisasi tersebut.

Penanaman wajib kopi masih terus dijalankan karena memberikan keuntungan terbesar bagi pemerintah. Pada akhir abad ke-19, mulai muncul suara-suara yang menentang soal penanaman wajib ini. Keberatan tersebut terus berkelanjutan hingga tahun 1892. Van Hoeten akhirnya mengajukan mosi agar penanaman wajib dihapuskan. Tahun 1917 penanaman wajib kopi ini dihapuskan.

D. PENUTUP

Priangan yang meliputi Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura merupakan daerah penghasil

kopi. Cianjur pada masa kepemimpinan Wiratanu III, sempat menyetorkan kopi kepada VOC yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan bupati lainnya di Priangan. Kopi yang tumbuh subur di Pegunungan Priangan merupakan komoditas yang dibutuhkan di Benua Atlantis, waktu itu VOC merupakan pemasok utama kopi, itulah sebabnya VOC menjadi penyalur kopi dari Pegunungan Priangan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh para penguasa sangat memberatkan petani. Itu terjadi ketika Priangan jatuh ke tangan VOC. Mereka menghendaki para petani untuk menanam kopi dari tanaman sukarela menjadi tanaman wajib. VOC juga mempermainkan harga. Menurunkan harga kopi di saat harga kopi di pasaran Eropa meningkat. Sistem tanam paksa kopi di Priangan sudah terjadi sejak masa VOC. VOC mengharuskan menanam kopi di pekarangan milik bupati, dengan panen kopi yang begitu menjanjikan, petani diharuskan untuk menanam kopi di pekarangan milik mereka. Begitu hasil panennya melimpah, dengan sekehendak hatinya VOC mengurangi pembelian kopi dari rakyat, sedangkan pengangkutan ke kapal tidak didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Di tengah adanya penurunan harga kopi oleh pihak VOC, muncullah Saudagar dari Cina yang mampu membeli kopi di atas standar harga yang telah ditetapkan oleh VOC, petani pun lebih memilih untuk menjual kopinya ke saudagar Cina. Meskipun dengan risiko terkena hukuman, akan tetapi tidak sedikit petani yang melarikan diri dan bermukim di luar Pegunungan Priangan.

Beralihnya kekuasaan dari VOC kepada pemerintahan Belanda, Daendels memerhatikan peran pemuka agama dalam keikutsertaannya menangani panen kopi dan bupati diberi peran untuk menerima setoran kopi dari petani dan mendapat komisi lebih dari sebelumnya. Petani diperbolehkan untuk menanam kopi di lahan-lahan liar, agar hasilnya terus

meningkat. Namun di balik itu, Daendels memberikan komisi kepada bupati dan bawahannya serta pejabat Belanda lainnya. Namun sayang rakyat harus menderita. Selain diwajibkan menanam kopi juga adanya kerja paksa untuk membangun sarana dan prasarana, baik jalan atau pun perkantoran.

Pada abad ke-19, di pasaran Eropa kopi masih tetap tinggi. Van den Bosch yang berkeinginan untuk meningkatkan panen kopi di Pegunungan Priangan tidak mendapat hasil yang maksimal. Pasaunya lahan untuk penanaman kopi yang sudah diperluas hingga ke tempat yang lebih tinggi yaitu hingga 1.000 m di atas permukaan laut, hasilnya justru menurun. Pasaunya Van den Bosch tidak belajar dari gubernur jenderal terdahulu. Para pejabat yang dipercaya untuk mengawasi penanaman kopi tidak berpengetahuan mengenai penanaman kopi, dari mulai memilih bibit atau pun lahan. Sehingga dengan kebun yang begitu luas, hasil panennya justru menurun. Van Rees yang melakukan penelitian mengenai turunnya panen kopi tersebut memberikan jalan keluar bahwa di Priangan perlu diadakan reformasi dan reorganisasi. Namun para bupati tidak menyetujui adanya reorganisasi tersebut. Setelah Van Hoeten mengajukan mosi agar penanaman wajib kopi agar dihapuskan, maka pada 1917, penanaman wajib kopi dihapuskan.

DAFTAR SUMBER

A. Jurnal, Makalah, Laporan Penelitian

Lasmiyati, Euis Thresnawaty, Endang Nurhuda, Adeng, Herry Wiryono, Heru Erwantoro, Iwan Roswandi, M. Halwi Dahlan. "Sejarah Kota Cianjur (1800-1945)" dalam *Jurnal Penelitian* Edisi 27/Desember 2002. Hlm. 108-162.

Dienaputra, D. Reiza., Drs. M.Hum., Agusmanon Yuniadi, "Perubahan Sosial Politik di Cianjur (1916-1942)", dalam *Laporan Penelitian* Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.

Ekadjati, Edi S, Dr., "Historiografi Priangan", Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran, 1991.

Warjita, "Lintasan Sejarah Garut dari Masa ke Masa", dalam Makalah *Seminar Sejarah Garut*. Garut: 18-19 Maret 2009.

Yogaswara, Yoyo, "Kopi di Daerah Priangan" Makalah *Kursus Sejarah*, 1991.

B. BUKU

Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2003.

Sejarah kabupaten Bandung, Konsentrasi Kajian Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Sejarah. Badung: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran.

Breman, Jan, 2014.

Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Dienaputera, Reiza, 2000.

Cianjur, dalam *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint.

Ekadjati, Edi S. et al., 1992.

Sejarah Pemerintahan Jawa Barat. Kerjasama UNPAD dan Pemprov Jawa Barat, tidak diterbitkan.

-----, 1993.

Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat. Bandung: Pemprov Daerah Tk I Jawa Barat, tidak diterbitkan.

Falah, Miftahul, 2010.

Sejarah Kota Tasikmalaya (1820-1942). Bandung: Uga Tatar Sunda dan Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat

Kartodirdjo, Sartono, 1992.

Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kunto, Haryoto, 2008.

Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.

Kuntowijoyo. 2003.
Metodologi Sejarah, edisi kedua.
 Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kutoyo Sutrisno, Soewadji Sjafei, Boedi Soesilo Poerwo, Sukirman Dharmmaulya, Masykuri, Suhartinah Sudiyono, Sri Sutjianingsih, 1986.
Sejarah Ekspedisi Pasukan Sultan Agung ke Batavia. Jakarta: Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud.

Lubis, Nina Herlina, 2008.
Sejarah Sumedang dari Masa ke Masa.
 Sumedang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Salam, Muhajir (Pemimpin Umum), 2014.
Dinamika Perekonomian Tasikmalaya pada Era Kolonial, Historia Soekapoera, Vol. 1 No. 2. Tasikmalaya: Historia Institute.

Suriadiningrat, Bayu, 1982.
Sajarah Cianjur Sareng Raden Aria Wiratanu Dalem Cikundul Cianjur.
 Jakarta: Rukun Warga Cianjur.

-----, 1982.
Mengenal Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Memperingati Hari Jadi Cianjur ke-306 (1677-1983). Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

....., 1985.
Pustaka Kabupatian I Bhumi Limbangan Dong Garut. Tidak diterbitkan.

C. Internet

Muhsin, Mumuh Z, dalam “Terbentuknya Keresidenan Priangan”, diakses dari www.pustaka.unpad.ac.id, tanggal 20 Maret 2008, jam. 13.48..